



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Banggar Setuju Rp 5,6 M, di APBD Berubah Rp 8 M

Bando Amin Membantah

BENGKULU - Sidang dugaan korupsi pengadaan lahan Tourism Information Centre (TIC) oleh Pemda Kepahiang, kemarin (18/9) kembali digelar. Agenda, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan anggota dan unsur pimpinan DPRD Kepahiang.

Hadir menyimak penyampaian keterangan saksi-saksi di hadapan majelis hakim PN Tipikor, tiga terdakwa yakni mantan Bupati Kepahiang Bando Amin, mantan Kabag Umum Samsu Yahelmi dan mantan ajudan Bando Amin, Sapuan.

Empat orang saksi dihadirkan JPU diantaranya anggota Komisi II DPRD Kepahiang Edwar Samsi, Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Adrian Devandra, Anggota Komisi I DPRD Kepahiang Richa Denis dan staf DPRD Kepahiang Yustina. Adrian Devandra memaparkan saat pembahasan APBD 2015 tepatnya pada bulan November 2014, dia bertindak sebagai ketua badan anggaran (Banggar).

Dia mengakui dalam KUA/PAS Pemkab Kepahiang melalui bupati saat itu, Bando Amin mengusulkan anggaran salah satunya pengadaan lahan untuk kepentingan umum pemerintahan. Dana yang diajukan untuk item anggaran tersebut secara gelondongan lebih kurang Rp 8,9 miliar.

Menurut Adrian Devandra, ada 13 usulan pengadaan lahan yang diajukan oleh Pemda Kepahiang, khususnya Bagian Pemerintahan Umum. Anggaran tersebut dalam pembahasan antara banggar dengan TAPD akhirnya dipangkas menjadi Rp 5,6 miliar. Dari 13 item lahan yang diajukan tersebut, akhirnya disepakati bersama antara banggar dan TAPD hanya lima item saja. Yakni pengadaan lahan untuk kantor BPBD, lahan lapas, lahan rumah dinas unsure pimpinan DPRD dan wakil bupati, lahan untuk pembangunan gedung Koprri dan lahan untuk perluasan kantor camat Ujan Emas. Karena devisit anggaran saat itu mencapai Rp 60 miliar.

"Jadi yang kami setuju saat itu hanya Rp 5,8 miliar itu. Namun setelah mecuatnya masalah pengadaan aset lahan TIC ini, kami buka lagi APBD 2015 ternyata yang tertera dalam APBD tersebut membengkak jadi Rp 8 miliar lebih," papar Adrian.

Pernyataan Adrian ini memicu pertanyaan Majelis Hakim diketuai Selamat

Suripto, SH, MH. Mengapa bisa sampai begitu? Adrian menjelaskan, nota RAPBD baru diberikan oleh TAPD sehari sebelum jadwal pengesahan APBD. Sehingga anggota dewan tidak lagi sempat mengecek satu persatu anggaran di 34 organisasi perangkat daerah (OPD).

Dia juga menjelaskan, dalam pembahasan RAPBD 2015 maupun dalam perubahan APBD 2015 tidak pernah membahas pengadaan lahan TIC. Adrian mengetahui ada pengadaan lahan tersebut dari laporan Pansus Aset yang dibentuk tahun 2016. "Saat itu saya memanggil Pansus Aset untuk menjelaskan mengenai informasi pengadaan lahan TIC itu," katanya.

Sementara itu saksi Edwar Samsi membenarkan keterangan Adrian terkait jumlah anggaran dan tanah apa saja yang disetujui untuk dibeli dalam APBD 2015 tersebut. "Saya sama sekali tidak tahu ada pembelian lahan TIC. Saya tahu saat bekerja sebagai pansus asset," katanya.

Menanggapi keterangan saksi, Bando Amin balik bertanya apakah anggaran yang ditandatangani dalam APBD 2015 itu Rp 5,6 miliar atau Rp 8 miliar. Sebab buktinya dalam APBD 2015 yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD termasuk Adrian dan disaksikan oleh Edwar Samsi itu Rp 8 miliar.

"Kalian buat pansus ini. Kalian tahu lahan yang dibeli itu lahan TIC dari mana? TIC itu tidak ada karena anggaran yang diajukan itu gelondongan. Untuk apa buat pansus kalau tidak tahu gelondongan itu," tukas Bando Amin.

Dia membantah kalau anggaran pengadaan lahan itu tidak dibahas. Pembahasan RAPBD itu katanya sebuah hal yang prinsip sehingga tidak mungkin tidak dibahas. Yang ditandatangani dalam APBD oleh pimpinan DPRD itu Rp 8 miliar. Hanya saja jumlah anggaran ini tidak nyambung dengan di bawah. "Anggaran ini dibahas," kata Bando Amin.

Bando juga keberatan lahan yang dibeli Pemda Kepahiang itu lahan TIC. Saksi tahu juga dari Kasubag, ketidaktahuan ini sehingga menyebutkan itu lahan TIC karena saksi tidak komunikasi dengannya. "Sampai matipun mencari TIC itu tidak ada," katanya.

Setelah tanggapan terdakwa, majelis hakim menunda sidang, akan kembali dilanjutkan minggu depan dalam agenda yang sama, pemeriksaan saksi-saksi (lainnya). (del)